

NAWA CITA JOKOWI-JK DALAM PARADIGMA PEMBANGUNAN EKONOMI

Syam Surya Syamsi

Department of Green Economy, Surya Univeristy

syam.surya@surya.ac.id

Abstrak

Nawa Cita adalah 9 (sembilan) program utama dan menjadi landasan paradigma pembangunan Indonesia di era Presiden Joko Widodo. Nawa Cita mencoba keluar dari paradigma pembangunan *mainstream* sejak era orde baru sampai pasca reformasi, yaitu paradigma pertumbuhan. Prioritas pembangunannya tidak hanya pertumbuhan, akan tetapi menegaskan kehadiran negara dan pemerintah di masyarakat, memperluas pemerataan pembangunan, mengurangi pengabaian pelayanan publik, membangun kemandirian ekonomi dan menjaga nilai-nilai budaya melalui revolusi mental serta meneruskan restorasi bangsa. Penelitian bertujuan untuk memaknai dan menganalisis posisi Nawa Cita dalam alur pemikiran paradigma pembangunan yang berkembang di dunia global dan menganalisis potensi hambatan dalam aktifitas operasionalisasinya. Penelitian dilakukan dengan analisis kepustakaan melalui metodologi penelitian kualitatif *hermeneutics* fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Nawa Cita adalah pembangunan manusia yang berkelanjutan, namun dalam operasionalisasinya akan menghadapi kendala terutama dari aparat dan budaya kerja birokrasi.

Kata Kunci: paradigma pembangunan, Nawa Cita, pertumbuhan, berkelanjutan, pembangunan manusia.

Nawa Cita is a name given to an development program consisting of nine main priorities and serves as a foundation of the Indonesian development paradigm in the era of President Joko Widodo. Nawa Cita attempts to detach from the mainstream development paradigm since from the New Order era to the post-reform, which is the paradigm of growth. The development priorities not only target on growth, but also confirm the presence of state and government in society, expansion of development equitability, a decline in public service negligence, establishment of economic independence, and the preservation of cultural values through a mental revolution and continuous restoration of the nation. This research aims to interpret and analyze the Nawa Cita position in the line of thought of a development of paradigm emerging in the global world, as well as analyze potential bottlenecks in its operational activities. The study was carried out by analyzing the literature through a qualitative research methodology in phenomenological hermeneutics. The results showed that even though Nawa Cita is sustainable human development program, its operations expect stumbling blocks, especially those from the bureaucratic systems and workplace culture.

Keywords: *development paradigm, Nawa Cita, growth, sustainable, human development.*

Pendahuluan

Pembangunan merupakan proses terintegratif dan multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas perkembangan kualitas hidup masyarakat, struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi nasional, secara terus menerus dan berkelanjutan. Dengan mengambil pandangan paradigma Thomas S. Kuhn (2012), paradigma pembangunan adalah cara pandang dan metode seseorang terhadap suatu persoalan yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pembangunan baik dalam arti sebagai proses maupun sebagai metode dan cara melakukannya, sehingga tujuan

pembangunan yaitu peningkatan standar hidup (*levels of living*), penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (*self-esteem*) dan peningkatan kebebasan (*freedom/democracy*) setiap orang dapat tercapai.

Walaupun dalam satu dasawarsa ini paradigma pembangunan manusia dan pembangunan yang berkelanjutan terus disuarakan oleh banyak negara, paradigma pertumbuhan masih merupakan paradigma *mainstream*, yang menjadi rujukan hampir semua negara dan badan-badan dunia dalam menilai kemajuan suatu negara. *Gross National Product* (GNP) atau angka pertumbuhan ekonomi, yang merupakan indikator yang dipergunakan dalam paradigma pembangunan, masih menjadi indikator utama di dalam menilai kemajuan ekonomi suatu negara. Sedangkan indikator pembangunan manusia yang ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pencapaian target *Milenium Development Goals* (MDGS) baru dievaluasi setelah proses evaluasi GNP.

Terdapat tiga faktor utama yang mengubah paradigma pembangunan di suatu negara, yaitu: perubahan ideologi, revolusi dan inovasi teknologi dan perubahan lingkungan internasional. Dalam sejarahnya Indonesia telah mengimplementasikan beberapa paradigma pembangunan yang berkembang di dunia dengan ciri khasnya masing-masing. Mulai dari paradigma pertumbuhan yang erat kaitannya dengan modernisasi dan paradigma kesejahteraan sosial dengan fokus kepada kesejahteraan bersama dan kemandirian ekonomi. Perubahan paradigma di atas, merupakan proses adaptasi dari ideologi yang dianut pemimpin Indonesia saat itu.

Pemerintahan yang dipimpin Joko Widodo dan Jusuf Kala (Jokowi-JK), pemenang pemilihan umum (pemilu) tahun 2014, telah menetapkan program prioritas pembangunannya yang dirangkum dalam sembilan program yang disebut Nawa Cita. Nawa Cita adalah konsep paradigma pembangunan yang menurut Jokowi mencoba keluar dari paradigma pembangunan *mainstream*, yaitu paradigma pertumbuhan sebagai tujuan utama pembangunan di Indonesia. Keberhasilan pembangunan di Indonesia yang ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil, dan telah mengantarkan Indonesia masuk dalam tatanan dunia maju, ternyata masih menimbulkan beberapa permasalahan, seperti masalah pemerataan pembangunan, kedaulatan dan kemandirian ekonomi serta ancaman terhadap kepribadian bangsa. Oleh karena itu, sejak awal Nawa Cita menegaskan bahwa tujuan pembangunan Indonesia adalah untuk menciptakan kemerdekaan ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Permasalahannya adalah dimanakah posisi Nawa Cita berada dalam alur pemikiran paradigma pembangunan yang berkembang di dunia global? Dan bagaimana operasionalisasi/pelaksanaannya dalam aktivitas pembangunan? Dalam konteks itulah penelitian ini dilakukan, sehingga pemikiran ekonomi pembangunan di Indonesia tidak terasing dengan perkembangan ilmu pengetahuan ekonomi pembangunan, terlebih bila Nawa Cita dapat memberi kontribusi bagi perkembangan pemikiran paradigma pembangunan di dunia global.

Kerangka Teori

Definisi Pembangunan

Dalam pandangan Amartya Sen, pembangunan adalah kebebasan (Sen, 1999, h.10-26). Sen mengajukan argumentasi bahwa walau sebagian besar negara berhasil menikmati kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi, namun masih banyak masyarakatnya yang tidak memiliki kualitas hidup yang baik dan terpaksa menjalani hidup dalam kemiskinan, kemelaratan tanpa ada pilihan untuk menjadi lebih baik. Dalam kerangka proses perubahan masyarakat, Hettne dalam Pietrse (2010, h.10), mengemukakan bahwa pembangunan adalah perubahan-perubahan sosial (dalam dan untuk masyarakat) yang disengaja dengan intervensi yang terorganisir oleh negara dalam urusan kolektif masyarakat. Intervensi yang dimaksud dilakukan secara tepat dan jelas dengan penyesuaian menurut kelas, budaya, konteks sejarah dan hubungan kekuasaan. Intervensi tersebut juga dilakukan secara komprehensif terhadap paradigma ilmu sosial seperti evolusionisme, Marxisme, Neo-Marxisme, Keynesianisme, fungsionalisme struktural, ekonomi neoklasik, pasca strukturalisme dan *post-modern*.

Dalam perkembangannya, ilmu pengetahuan tentang pembangunan suatu negara menjadi salah satu disiplin ilmu pengetahuan yang mengalami perubahan teori dan paradigma sangat cepat sepanjang lebih dari setengah abad terakhir, dan banyak peristiwa-peristiwa atau alasan yang mendorong terjadinya transformasi pemikiran paradigma pembangunan, dan menjadi daya dorong bagi para pemikir ekonomi untuk merumuskan ulang kerangka teoretis dan paradigma pembangunan (Syamsi, 2012, h.3-5).

Transformasi Paradigma Pembangunan Ekonomi

Perkembangan pemikiran tentang pembangunan ekonomi selalu berubah seiring dengan perubahan zaman. Adelman (1999, h.1-2) mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) faktor utama yang menyebabkan perubahan paradigma pembangunan suatu negara, yaitu: Pertama, perubahan ideologi. Ideologi, baik ideologi partai maupun ideologi yang dimiliki pemimpinnya, merupakan rujukan teoretis dan *policy prescriptions* yang utama dalam paradigma pembangunan. Kedua, revolusi inovasi teknologi. Teknologi telah berevolusi, dan berlangsung spektakuler membawa implikasi luas dan pengaruh kuat pada perkembangan teori dan paradigma pembangunan. Ketiga, revolusi lingkungan internasional sebagai dampak globalisasi ekonomi yang berlangsung sangat intensif, yang tercermin pada kian terintegrasinya aktivitas ekonomi antar bangsa, adanya liberalisasi ekonomi dan intensifikasi perdagangan bebas antarnegara, meluasnya operasi perusahaan multinasional, dan pesatnya perkembangan bisnis finansial internasional.

Paradigma pembangunan yang sangat kuat dan sampai saat ini menjadi rujukan hampir semua negara adalah Paradigma Pembangunan berdasarkan Pertumbuhan Ekonomi. Paradigma ini dimulai dari analisis jejak pemikiran Adam Smith dalam Kartasmita (1997, h.3-5) yang mengemukakan bahwa proses pertumbuhan dimulai apabila perekonomian mampu melakukan pembagian kerja (*division of labor*) sehingga meningkatkan produktivitas dan pada gilirannya akan meningkatkan

pendapatan. Smith juga menggarisbawahi pentingnya skala ekonomi, karena dengan meluasnya pasar akan membuka inovasi-inovasi baru yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Paradigma pertumbuhan berkembang menjadi teori pertumbuhan ekonomi modern dengan berbagai variasinya yang pada intinya dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang menekankan pentingnya akumulasi modal (*physical capital formation*) dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (*human capital*) (Kartasmita, 1997, h.4-5).

Pemikiran model pertumbuhan yang dampaknya besar dan berlanjut hingga sekarang adalah suatu model dikembangkan oleh Harrod (1948) dan Domar (1946), yaitu model yang berpijak pada pemikiran Keynes (1936). Model ini menekankan pentingnya aspek permintaan dalam mendorong pertumbuhan jangka panjang dan pertumbuhan ekonomi yang akan ditentukan oleh dua unsur pokok, yaitu tingkat tabungan (investasi) dan produktivitas modal (*capital output ratio*) (Kartasmita, 1997, h.5). Selain teori Harrod – Dumar di atas, teori pertumbuhan yang fenomenal adalah teori yang dikemukakan oleh Rostow (1960) dalam *Economics Journal* berjudul *The Take-Off into Self-Sustained Growth*. Rostow mengajukan suatu tesis bahwa transformasi pembangunan ekonomi negara-negara bisa dilacak dari dimensi sejarah pertumbuhan ekonominya. Ada tiga tahap yang dibayangkan oleh Rostow, yakni tahap prakondisi tinggal landas, tahap tinggal landas, dan tahap kemandirian ekonomi. Kemudian ide sederhana ini dikembangkannya menjadi lima tahap kategori dalam *The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto*, dengan fokus teori pembangunan adalah peningkatan pendapatan perkapita, yaitu tahap *Traditional Society*, *Preconditions for Growth*, *The Take-off*, *The Drive to Maturity*, dan *The Age of High Mass Consumption*. Rostow memandang masalah pembangunan semata-mata mentransformasi masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern melalui suatu proses pertumbuhan yang unilinier, yang berarti bahwa setiap negara diharapkan mengikuti alur pembangunan yang sama tanpa perlu memerhatikan kondisi awal negara yang bersangkutan, seperti latar belakang sejarah, struktur sosial, budaya, ketersediaan sumber daya alam dan manusia, orientasi politik, dan sebagainya (Syamsi, 2012, h.6-9).

Dalam pandangan pengikut aliran teori pertumbuhan yang mendominasi pemikiran ekonomi pembangunan pada dekade tahun 50-60 an, disebutkan bahwa hasil pertumbuhan akan dapat dinikmati masyarakat sampai di lapisan yang paling bawah (*trickle down process*). Namun demikian, bukti-bukti empiris dan uji teoritis menunjukkan bahwa *trickle down process* tidak pernah terwujud. Bahkan, di banyak negara kesenjangan sosial ekonomi makin melebar. Hal ini disebabkan karena pada kenyataannya kelompok masyarakat yang sudah baik dan lebih mampu, lebih memiliki posisi yang menguntungkan sehingga dapat memanfaatkan kesempatan untuk memperoleh semua atau sebagian besar hasil pembangunan. Dengan demikian, yang kaya makin kaya dan yang miskin tetap miskin, bahkan dapat menjadi lebih miskin (Kartasmita, 1995, h. 8-9).

Paradigma pembangunan yang akhir-akhir ini terus mendominasi pemikiran pembangunan adalah paradigma pembangunan manusia (*human development paradigm*). Paradigma Manusia, mengoreksi isu sentral dan tema dasar teori pembangunan sebelumnya, berupa; (i) pertumbuhan, (ii)

akumulasi kapital, (iii) transformasi struktural; menjadi (i) kebebasan dan demokrasi, (ii) distribusi pendapatan, (iii) keadilan, (iv) pengurangan kemiskinan. Keempat isu ini adalah jawaban atas kritik terhadap paradigma pembangunan sebelumnya. Kendati telah menciptakan perubahan penting dalam kehidupan suatu bangsa serta mengantarkan negara-negara berkembang memasuki tahapan modernisasi, sebagai titik pijak menuju kehidupan maju dan sejahtera. Namun, paradigma pembangunan pertumbuhan juga telah menciptakan ketimpangan dan kesenjangan yang mencolok antar-kelompok masyarakat dan membelenggu kebebasan manusia yang paling asasi (Adelman, 1999, h.1-4).

Menurut pandangan paradigma pembangunan manusia, tujuan pokok pembangunan adalah memperluas pilihan-pilihan manusia (Ul Haq dalam Kartasasmita, 1995, h.3). Pengertian ini mempunyai dua sisi; pertama, pembentukan kapabilitas yang berfungsi sebagai manusia, tercermin dalam kesehatan, pengetahuan dan keahlian yang meningkat. Kedua, penggunaan kemampuan yang telah dipunyai untuk bekerja, untuk menikmati kehidupan atau untuk aktif dalam kegiatan kebudayaan, sosial, dan politik. Paradigma pembangunan manusia disebut sebagai sebuah konsep yang holistik dan tercakup dalam 4 unsur penting, yakni: (1) peningkatan produktivitas, (2) pemerataan kesempatan, (3) kesinambungan pembangunan, serta (4) pemberdayaan manusia. Konsep ini kemudian diprakarsai dan ditunjang oleh badan PBB melalui UNDP yang mengembangkan Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*). Indeks ini merupakan indikator komposit/gabungan yang terdiri dari 3 ukuran, yaitu kesehatan (sebagai ukuran *longevity*), pendidikan (sebagai ukuran *knowledge*) dan tingkat pendapatan riil (sebagai ukuran *living standards*).

Terdapat enam alasan mengapa paradigma pembangunan manusia ini bernilai penting, yaitu: (i) pembangunan bertujuan akhir meningkatkan harkat dan martabat manusia; (ii) mengemban misi pemberantasan kemiskinan; (iii) mendorong peningkatan produktivitas secara maksimal dan meningkatkan kontrol atas barang dan jasa; (iv) memelihara konservasi alam (lingkungan) dan menjaga keseimbangan ekosistem; (v) memperkuat basis *civil society* dan institusi politik guna mengembangkan demokrasi; dan (vi) merawat stabilitas sosial politik yang kondusif bagi implementasi pembangunan (Basu, 2002, h.15-17).

Dalam perkembangan selanjutnya, pemikiran dan pandangan yang mengkoreksi paradigma pembangunan yang hanya memerhatikan tujuan-tujuan sosial dan ekonomi terus berkembang luas, seperti dalam pemikiran Etika Pembangunan. Goulet (1977, h.5-7) merupakan pelopor dari pemikiran etika pembangunan dan mengemukakan bahwa proses pembangunan harus menghasilkan: (1) terciptanya "solidaritas baru" yang mendorong pembangunan yang berakar dari bawah (*grassroots oriented*), (2) memelihara keberagaman budaya dan lingkungan, dan (3) menjunjung tinggi martabat serta kebebasan bagi manusia dan masyarakat. Selanjutnya Sen (1999), mengembangkan suatu konsep Etika Pembangunan, Sen, A. dengan pendekatan etika yang tidak semata-mata pendekatan moral filosofis, akan tetapi perilaku rasional manusia dalam kerangka "preferensi" dan konsistensi untuk mendapatkan pencapaian yang maksimal, yang dikenal dengan *self-interest*. Dalam pandangan Sen,

pembangunan beretika akan mendorong manusia menetapkan tujuan kehidupannya sendiri. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya diukur berdasarkan data statistik saja seperti angka pertumbuhan ekonomi, index pembangunan manusia atau apapun juga tetapi harus terlihat dan dirasakan oleh manusia itu sendiri, yaitu kehidupan yang berkualitas (*quality of life*) dan kebahagiaan (*happiness*) (Syamsi, 2012, h.16-17).

Selain masalah kemanusiaan, dunia semakin sadar bahwa pembangunan juga harus memerhatikan lingkungan dan kehidupan yang terus berkualitas di masa mendatang. Oleh karena itu, munculah kesadaran bahwa proses pembangunan dimana anggota masyarakat meningkatkan kapasitas perorangan dan institusionalnya untuk memobilisasi dan mengelola sumber daya dan menghasilkan perbaikan-perbaikan yang berkelanjutan dan merata dalam kualitas hidup yang sesuai dengan aspirasi mereka sendiri. Kesadaran itu berkembang dalam suatu pemikiran Paradigma Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable development*). Konsep *sustainable development* yang berdasarkan *Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future* adalah pembangunan yang bertujuan untuk: memenuhi semua kebutuhan dasar dan memperluas kesempatan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik; mempromosikan nilai-nilai yang dapat mendorong standar konsumsi yang masih berada dalam batas-batas ekologis; mensyaratkan bahwa masyarakat memenuhi kebutuhan manusia baik dengan meningkatkan potensi produktifnya maupun dengan menjamin kesempatan yang sama bagi semua manusia; perkembangan demografis berada dalam harmoni dengan potensi produktif perubahan ekosistem; berkompromi dengan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan pokok di masa yang akan datang; tidak boleh membahayakan sistem alami yang mendukung kehidupan di Bumi: atmosfer, perairan, tanah, dan makhluk hidup; kepastian adanya akses yang adil terhadap sumber daya yang terbatas dan upaya reorientasi teknologi untuk mengurangi penyalahgunaan; sumber daya terbarukan perlu untuk tidak dihabiskan dengan cara memanfaatkannya dalam batas-batas agar dapat tetap melakukan regenerasi dan pertumbuhan alami; laju penurunan sumber daya tidak terbarukan harus diambil alih oleh beberapa pilihan masa depan sesegera mungkin; keharusan untuk melakukan konservasi spesies tumbuhan dan hewan; meminimalkan dampak buruk dari kualitas udara, air, dan elemen alam lainnya sehingga dapat menopang keseluruhan ekosistem; dan proses perubahan dimana eksploitasi sumber daya, arah investasi, orientasi perkembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan selaras dan meningkatkan potensi pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia di masa sekarang dan masa yang akan datang.

Dalam perjalanan pembangunan, Indonesia telah mengalami beberapa periode pembangunan dengan paradigma pembangunan yang berbeda. Dimulai dengan paradigma pembangunan sosial di awal kemerdekaan, terus berubah menjadi paradigma pembangunan pertumbuhan sejak kepemimpinan orde baru. Reformasi 1998, tidak mengubah paradigma pembangunan di Indonesia, yaitu paradigma pertumbuhan. Baru pada pemerintahan Jokowi, yaitu periode 2014-2019, paradigma pembangunan di Indonesia secara jelas berubah menjadi paradigma pembangunan manusia, yang ditegaskan Nawa Cita.

Nawa Cita

Pada saat mencalonkan diri sebagai presiden, Jokowi dan Jusuf Kala (JK) selain menyampaikan visi dan misi pencalonan presiden dan wakil presiden juga menyertakan sembilan agenda prioritas untuk mewujudkan visi dan misi mereka. Agenda ini disebut sebagai Nawa Cita, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia (Visi Misi Jokowi – JK, 2014, h.6-7).

Nawa Cita Jokowi berpedoman kepada ajaran Trisakti Bung Karno. Konsep Trisakti dilahirkan Soekarno di saat Indonesia berada dalam iklim revolusi, namun di tengah gencetan dua kekuatan ideologi besar yang menjadi dasar dua paradigma ekonomi, yaitu; *capitalism* dan sosialis-komunis. Soekarno bersikap tidak mengikuti kedua aliran tersebut dalam merancang Pembangunan Indonesia memilih “Kemerdekaan Diri”, yang merepresentasikan kedaulatan Indonesia dalam politik, mendorong terciptanya kebebasan untuk mempresentasikan kepribadian kebudayaan Indonesia dan menciptakan jalan kemandirian ekonomi dengan tidak bergantung kepada kekuatan imperialis. Nawa Cita ingin meneruskan cita-cita Trisakti yang putus di tengah jalan, karena Nawa Cita lahir di tengah-tengah krisis mentalitas yang menerpa bangsa Indonesia dan reformasi yang menumbangkan rezim Orde Baru ternyata baru sebatas melakukan perombakan yang sifatnya institusional, belum menyentuh paradigma, *mindset* atau budaya politik bangsa Indonesia.

Metode Penelitian

Tulisan ini merupakan penelitian pustaka yang memusatkan perhatian pada studi filsafat ekonomi, terkait isu-isu penting seputar paradigma ekonomi pembangunan. Kajian ini berangkat dari suatu hipotesis bahwa Nawa Cita adalah paradigma pembangunan yang keluar dari paradigma pembangunan *mainstream*, yaitu paradigma pertumbuhan, yang menjadi dasar pemikiran pembangunan oleh pemerintahan sebelumnya.

Penelitian bertujuan untuk memaknai (*to interpret atau to understand*) dan menganalisis posisi Nawa Cita dalam alur pemikiran paradigma pembangunan yang berkembang di dunia global dan analisis aktifitas operasionalisasinya, sehingga pemikiran ekonomi pembangunan di Indonesia tidak terasing dengan perkembangan ilmu pengetahuan ekonomi pembangunan di dunia.

Penelitian dilakukan dengan mempergunakan metode hermeneutika fenomenologis dari Paul Ricoeur. Pertimbangan pemilihan metodologi Paul Ricoeur karena metode ini dalam literatur ilmu humaniora diakui sebagai metode penafsiran yang *rigorous* (ketat), dapat membawa peneliti kepada pemahaman tentang fenomena secara apa adanya, menyeluruh dan sistematis tanpa mengabaikan aspek objektivitasnya (Bauman, 2009, h.9). Metode yang dikembangkan oleh Ricoeur ini merupakan metode yang dapat menyelesaikan pertentangan dilematis antara paradigma kuantitatif dan paradigma kualitatif yang didasari oleh pertentangan epistemologis antara *explaining* atau *enklären* (menjelaskan gejala untuk kemudian meramalkan dan mengontrolnya) dan *understanding* atau *verstehen* (memahami melalui penafsiran terhadap gejala) serta mempertemukan keduanya dalam satu metode penelitian yang koheren dan konsisten.

Menurut Ricoeur (1998, h.4-6), hermeneutika adalah teori pengoperasian pemahaman dalam hubungannya dengan interpretasi terhadap teks. Menurutnya, apa yang diucapkan atau ditulis manusia mempunyai makna lebih dari satu bila dihubungkan dengan konteks yang berbeda. Karakteristik inilah yang menjadikan hermeneutik diperlukan dalam memahami manusia. Dalam hal ini, pentingnya pemahaman tentang *distanciation* (pengambilan-jarak). Kembalinya hermeneutika kepada fenomenologi terjadi melalui pengambilan-jarak dan bersama memungkinkan subyek untuk memaknai pengalaman yang dihayatinya dan kepemilikannya akan tradisi historis.

Dengan fenomenologi hermeneutikanya, Ricoeur (1991, h.106) lalu mendefinisikan teks sebagai “...any discourse fixed by writing.” Teks adalah diskursus yang dimantapkan dalam bentuk tulisan. Diskursus diartikan sebagai peristiwa bahasa atau penggunaan bahasa sebagai lawan dari sistem bahasa atau sistem kode linguistik. Diskursus menunjukkan bahasa sebagai peristiwa, bukan sebagai sistem. Satuan terkecil dari gramatika bahasa yang melandasi teks adalah kata, sedangkan satuan terkecil dari diskursus adalah kalimat. Teks merupakan hasil pengambilan-jarak terhadap pengalaman yang dihayati dalam dunia. Pengalaman dan tindakan manusia mengandung pemaknaan linguistik, oleh karena itu keduanya merupakan diskursus. Dengan kata lain, pengalaman dan tindakan sebagai diskursus di sini dibekukan menjadi teks atau dalam bentuk-bentuk linguistik yang dapat dibaca.

Data penelitian yang digunakan adalah pokok-pokok pemikiran Nawa Cita Jokowi yang disampaikan dalam Visi-Misi Jokowi/JK, Ketentuan perundangan mengenai Pembangunan Jangka Panjang 2014-2019 Pemerintahan Jokowi – JK, APBN 2015, teks, naskah-naskah Pidato Jokowi dalam menjelaskan Nawa Cita, tanggapan/berita terkait dengan Nawa Cita dan buku teks, serta jurnal ilmiah tentang pemikiran paradigma pembangunan ekonomi.

Pembahasan

Ideologi sebagai Dasar Paradigma Pembangunan

Ideologi sebagai dasar pelaksanaan pembangunan ekonomi, kembali mengemuka setelah Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden Republik Indonesia terpilih 2014. Dalam pidato visi dan misinya, Jokowi (2014), mengemukakan bahwa pembangunan sebagai jalan perubahan suatu negara, harus dilakukan dengan jalan ideologi, yaitu:

“Jalan perubahan dari reformasi semakin terjal dan penuh ketidakpastian. Sehingga perlu dilakukan upaya perubahan agar Indonesia Hebat dapat direalisasikan. Jalan perubahan itu harus ditempuh dengan jalan ideologis, dan jalan ideologis itu adalah pedoman hidup, pedoman bermasyarakat yang seharusnya tidak hanya dihafalkan, namun harus diwujudkan dalam sebuah perbuatan.”

Ideologi adalah konsep mengenai cara manusia hidup yang paling komprehensif di seluruh ilmu sosial (McLellan, 1995, p.1). Ideologi adalah kerangka model daya pikir dan mental manusia dalam keyakinan bersama, opini, dan nilai-nilai dalam suatu kelompok, kelas, konstituen untuk mencapai tujuan hidupnya (Freedon, 2001). Ideologi juga berusaha untuk menjelaskan atau menafsirkan dunia karena dengan membuat pernyataan atau asumsi tentang sifat manusia, peristiwa sejarah, realitas saat ini, dan kemungkinan masa depan untuk membayangkan dunia sebagaimana mestinya, menentukan cara yang dapat diterima dalam mencapai cita-cita sosial, ekonomi, dan politik. Dengan demikian, secara sederhana ideologi adalah filosofi hidup yang jadi dasar panduan bagi masyarakat untuk menjawab pertanyaan bagaimana harus hidup. (Jost, dkk. 2009, h.1-4). Adelman (1999, h.1-2) mengemukakan bahwa jalan ideologis adalah salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya perubahan paradigma pembangunan. Dalam pengantar Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJM) 2014-2019, dikemukakan bahwa ideologi adalah penentu daya tahan suatu bangsa, sebagai penuntun dan penggerak juga sebagai pemersatu perjuangan dan sebagai bintang pengarah pembangunan bangsa.

Namun demikian, jalan perubahan melalui ideologi yang akan dilakukan Jokowi tersebut masih dipertanyakan bentuknya. Bagi masyarakat, hal yang penting bukan alternatif konsep dan bicara, akan tetapi yang diperlukan adalah tindakan nyata dari aktifitas yang dilakukan. Seperti dikemukakan Faisal (2014, h.1):

“Pembangunan itu adalah tindakan. Oleh karena itu, apakah Jokowi melakukan perubahan pembangunan melalui Nawa Cita, harus dilihat bagaimana tindakan mencapai kinerja pembangunan ekonomi yang tinggi secara keseluruhan itu dirasakan juga dampaknya oleh masyarakat menengah ke bawah. Apapun ideologi, bukan sekadar omongan di publik, namun yang lebih penting adalah konsistensi atas semua tindakan.”

Untuk lebih memahami akan makna Nawa Cita sebagai dasar ideologi pemikiran atau paradigma pembangunan di Indonesia selama kurun waktu 2014-2019, dilakukan analisis terhadap setiap Cita, nari Nawa Cita, sebagai berikut:

Cita Pertama dan Cita Kedua: Mengingat Tugas Dasar negara

Dalam pidato pelantikannya Jokowi (2014), kembali menegaskan tentang tugas Pemerintah dan negara, sebagai berikut:

“Pemerintahan yang saya pimpin akan bekerja untuk memastikan seluruh rakyat di pelosok tanah air merasakan kehadiran pelayanan pemerintah. Saya yakin, negara semakin kuat dan berwibawa bila semua lembaga negara bekerja menjalankan tugas serta fungsi masing-masing dan menanggung mandat. Kepada para nelayan, buruh, petani, para pedagang bakso, para pedagang asongan, sopir, akademisi, buruh, TNI, Polri, pengusaha dan kalangan profesional, untuk bekerja keras bahu-membahu bergotong-royong, karena inilah momen sejarah bagi kita semua untuk bergerak bersama, untuk bekerja, bekerja dan bekerja.”

Cita Pertama: Menghadirkan Kembali negara untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga negara

Penempatan “menghadirkan kembali Negara” dalam Cita Pertama, merupakan hal yang penting bagi Jokowi. Jokowi melihat bahwa selama setelah reformasi, negara seolah lupa akan tugasnya yang diindikasikan dengan tiga masalah pokok, yakni: (1) Merosotnya kewibawaan negara, negara tidak kuasa memberikan rasa aman kepada segenap warga negara, tidak mampu mendeteksi ancaman terhadap kedaulatan wilayah, membiarkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), lemah dalam penegakan hukum, dan tidak berdaya dalam mengelola konflik sosial. Negara semakin tidak berwibawa ketika masyarakat semakin tidak percaya kepada institusi publik dan pemimpin tidak memiliki kredibilitas yang cukup untuk menjadi teladan dalam menjawab harapan publik akan perubahan ke arah yang lebih baik; (2) Melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional, yang diindikasikan dengan belum terselesaikannya persoalan kemiskinan, kesenjangan sosial, kesenjangan antarwilayah, kerusakan lingkungan hidup akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, dan ketergantungan dalam hal pangan, energi, keuangan, dan teknologi; (3) Merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa, yang diperlihatkan dengan politik penyeragaman telah mengikis karakter Indonesia sebagai bangsa pejuang, memudarkan solidaritas dan gotong-royong, serta meminggirkan kebudayaan lokal.

Jati diri bangsa terkoyak oleh merebaknya konflik sektarian dan berbagai bentuk intoleransi. negara abai dalam menghormati dan mengelola keragaman dan perbedaan yang menjadi karakter Indonesia sebagai bangsa yang majemuk. Pada saat yang sama, kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang begitu cepat telah melahirkan “dunia tanpa batas” (*borderless-state*) yang pada gilirannya membawa dampak negatif berupa kejut budaya (*culture shock*) dan ketunggalan identitas global di kalangan generasi muda Indonesia. Hal ini mendorong pencarian kembali basis-basis identitas primordial sebagai representasi simbolik yang menjadi pembeda dengan lainnya (RPJM, 2014-2019, h.2-4).

John Locke (1993), filsuf politik kenegaraan terkemuka, salah satu tokoh utama yang meletakkan dasar-dasar bernegara, mengingatkan bahwa negara memiliki beberapa prinsip penting, yaitu: pertama, kekuasaan negara tidak lain merupakan sebuah kepercayaan rakyat kepada pemerintah, dimana hal itu dinamakan *government by the consent of the people*, penguasa tetap diakui legitimasi

kekuasaannya selama ia tak menyalahi kepercayaan rakyat. Kedua, negara hanya dibenarkan bertindak dan berbuat sejauh untuk melaksanakan tujuan yang dikehendaki rakyat. Oleh karena itu, menurut Locke tugas negara tidak boleh melebihi apa yang menjadi tujuan rakyat. Ketika, negara tidak dibenarkan mencampuri segala hal yang menyangkut kepentingan rakyat. Dalam hal ini terdapat dominasi jika ada negara yang dominan dalam mengatur rakyat menurut Locke hanya akan menyebabkan hilangnya hak-hak rakyat dan ketidakberdayaan rakyat menghadapi kekuasaan negara.

Dengan memulai dasar pembangunan dengan mengingatkan tugas dasariah negara yang tidak sekedar memajukan pertumbuhan ekonomi, Nawa Cita Jokowi mendekati pemikiran dari Sen (1999), pemikir utama paradigma pembangunan manusia. Dalam awal pemikirannya tentang pembangunan, Sen (1999, h.3) dalam Syamsi (2012, h.53-54), mengemukakan:

“Pembangunan seyogyanya tidak hanya membuat suatu kemewahan yang tidak terbayangkan sebelumnya, tetapi mendorong terjadinya perubahan yang luar biasa di luar lingkup ekonomi serta membentuk pemerintahan yang demokratis dan partisipatif sebagai model organisasi politik. Pembangunan juga seharusnya berhasil meletakkan peran negara secara nyata untuk mengurangi kemiskinan, kelaparan dan memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupan. negara tidak boleh melakukan pelanggaran kebebasan politik dan kebebasan dasar manusia lainnya. negara wajib hadir melindungi kaum marginal, menempatkan kepentingan kaum perempuan, dan menjaga kehidupan dengan lingkungan hidup yang berkualitas.”

Dari penjelasan di atas, dapat dikemukakan bahwa Nawa Cita merupakan pemikiran pembangunan yang tidak semata menekankan kepada pertumbuhan semata. Nawa Cita, menegaskan negara memahami tugasnya melayani rakyat, menjaga nilai-nilai kemanusiaan rakyat jauh lebih mendasar dari sekedar pertumbuhan ekonomi. Dengan memahami tugasnya, negara dalam melaksanakan pembangunan tidak akan meninggalkan jejak kemiskinan, kelaparan, dan pelanggaran kebebasan politik dan kebebasan dasar manusia lainnya.

Cita Kedua: Membuat Pemerintah Tidak Absen dengan Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis, dan Terpercaya

Dalam Cita Kedua, Jokowi menyampaikan tugas utama pemerintahan sebagai pelaksana tugas negara. Secara tegas, Jokowi (2014), menegaskan hal ini dalam pidato pelantikannya bahwa “*Pemerintahan yang saya pimpin akan bekerja untuk memastikan setiap rakyat di seluruh pelosok tanah air, merasakan kehadiran pelayanan pemerintahan.*”

Kehadiran Pemerintah Indonesia pada saat ini semakin dirasa penting, karena Indonesia masih terpuruk dalam masalah pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Data skor indeks korupsi Indonesia adalah 32 dari nilai penuh 100 (0 sangat korup, 100 sangat bersih), sehingga berdasarkan data Corruption Perception Index (Transparency International, 2013) Indonesia hanya menduduki peringkat 114 dari 177 negara terkorup. Selain itu data *Global Corruption Barometer*, 2013, menunjukkan bahwa 1 dari 3 warga (36%), mengaku harus membayar suap untuk memperoleh layanan di 8 instansi publik utama.

Adanya permasalahan dalam tugas dan kinerja pemerintahan juga disampaikan oleh ahli hukum

dan ekonomi, yaitu Prof. Kusnadi Harjasoemantri (2013, h.1) yang mengemukakan bahwa:

“Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 memperjuangkan adanya *good governance and clean government* sebagai reaksi terhadap rezim Orde Baru yang penuh kolusi, korupsi dan nepotisme, serta tersumbatnya saluran partisipasi masyarakat dalam memberikan kontrol sosial. Sampai saat ini, keinginan untuk memperoleh *good governance and clean government* masih jauh daripada dipenuhi. Berbagai kendala menampakkan diri dalam bentuk gejala politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, pemerintahan yang tidak hadir dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat yang merupakan muara keresahan dan letupan-letupan yang membahayakan sendi-sendi kehidupan masyarakat.”

Oleh karena itu, Jokowi di saat awal menegaskan kembali tugas pemerintah yaitu menjalankan pemerintahan yang bersih dan melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik seperti yang dicanangkan dalam sebuah resolusi dari *The Council of the European Community* yang membahas *Human Rights, Democracy and Development*, di tahun 1991. Di dalam resolusi itu disebutkan bahwa diperlukan beberapa prasyarat bagi pemerintahan yang baik, yaitu mendorong penghormatan atas hak asasi manusia, mempromosikan nilai demokrasi, dan mewujudkan *good governance* (UNDP, 2001).

Kunci utama memahami *good governance*, menurut UNDP (1997) adalah memahami prinsip-prinsip dasar yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik, meliputi: Partipasi (*participation*), Aturan Hukum (*rule of law*), Transparansi (*transparency*), Daya Tanggap (*responsiveness*), Berorientasi Konsensus (*consensus orientation*), Berkeadilan (*equity*), Efektif dan efisien (*effectiveness and efficiency*), Akuntabilitas (*accountability*) dan memiliki Visi Strategis (*strategic holders*).

Good Governance hanya bermakna bila keberadaannya ditopang oleh lembaga yang melibatkan kepentingan publik, yaitu; (1) negara yang selalu hadir dalam membuka ruang dan kondisi yang stabil, berkeadilan, melayani publik, menegakkan HAM, transparan dan akuntabel, melindungi lingkungan hidup dan mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan publik; (2) sektor Swasta yang menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan standar kehidupan masyarakat, menaati peraturan dan melaksanakan tata usaha yang baik, dan; (3) masyarakat madani yang selalu berperan aktif, menjaga hasil pembangunan, melaksanakan *checks and balances* pemerintah (Harjasoemantri, 2013, h.2-5).

Apapun landasan pemikiran paradigma pembangunan, kepentingan kehadiran pemerintahan yang bersih, tidak korup, anti suap dan berwibawa merupakan hal yang sangat penting. Hal ini disebabkan semua asumsi teori pembangunan tentang modal, investasi dan pasar dapat berjalan optimal sesuai dengan yang diasumsikan bila dikelola secara baik, bersih dan oleh pemerintahan yang berwibawa di mata rakyatnya. Namun demikian, paradigma Pembangunan Manusia, yang didasari pemikiran Amartya Sen dan diimplementasikan oleh Mabub Ul Haq, lebih tegas mengingatkan tugas pemerintah dalam pembangunan adalah dengan bersungguh-sungguh bertanggung jawab dan bersih untuk menciptakan suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakatnya untuk menikmati kehidupan yang berkualitas, mendorong kreatifitas rakyat, sehat, dan berumur panjang. Walaupun sederhana, tujuan ini sering terlupakan oleh keinginan pemerintah untuk meningkatkan akumulasi barang dan modal. Dalam konteks ini, ditegaskan bahwa tujuan pokok pembangunan adalah memperluas pilihan-pilihan manusia (Ul Haq, 1985, dalam Kartasamita, G. 1997,h.3). Pengertian ini mempunyai dua sisi:

pertama, pemerintah secara bertanggung jawab dan secara benar berkewajiban melakukan pembentukan kemampuan manusia seperti tercermin dalam kesehatan, pengetahuan dan keahlian yang meningkat. Kedua, pemerintah mendorong agar penggunaan kemampuan yang telah dimiliki masyarakat dimaksud dapat dioptimalkan untuk bekerja, untuk menikmati kehidupan atau untuk aktif dalam kegiatan kebudayaan, sosial, dan politik (Kartasasmita, 1997, h.2013).

Cita Ketiga, Keempat dan Kelima: Pembangunan adalah Pemerataan dan Keadilan untuk Meningkatkan Kualitas Kehidupan Manusia

Cita Ketiga: Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka negara Kesatuan

Indonesia pada saat ini sudah menjadi negara yang disegani. Menjadi bagian anggota G 20 dan menjelma menjadi negara berpendapatan menengah dengan pendapatan per kapita sebesar USD 3.580. Pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dengan rata-rata 5-6% per tahun telah melahirkan tambahan kelas menengah terutama di kota-kota besar selama 10 tahun terakhir. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang sering kali dibanggakan sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan oleh pemerintah Indonesia, belum bisa menggambarkan situasi nyata di masyarakat, serta masih menyembunyikan beberapa permasalahan, yaitu: ketimpangan atau kesenjangan pembangunan. Dalam kurun waktu 30 tahun (1982-2012) kontribusi PDRB Kawasan Barat Indonesia (KBI), yang mencakup wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali sangat dominan, yaitu sekitar 80 persen dari PDB, sedangkan peran Kawasan Timur Indonesia (KTI) baru sekitar 20 persen. Di tengah pertumbuhan yang tinggi, masih terdapat 122 kabupaten yang merupakan daerah tertinggal. Pembangunan juga masih memberikan kesenjangan antara wilayah desa dan kota, sehingga terus terjadi urbanisasi, yang pada gilirannya memberikan beban dan masalah sosial di wilayah perkotaan. (Faisol, dkk. 2014, h.16-22).

Kemudian terdapat ketimpangan pendapatan. Rasio ini di Indonesia terus meningkat dari 0,32 pada tahun 2003 menjadi 0,41 pada tahun 2012. Pada tahun 2012, 20% kelompok terkaya menikmati 49% pendapatan nasional (naik dari level 40% pada tahun 2002). Sementara 40% kelompok termiskin menikmati 16% pendapatan nasional (turun dari 20% pada tahun 2002). Tidak hanya itu, 10% penduduk terkaya mengalami peningkatan pendapatan 12 kali lipat dibandingkan dengan 10% termiskin (naik dari level 9.6 kali pada tahun 2007 (Faisol, dkk. 2014, h.16-18).

Setelah itu adanya ketimpangan pengelolaan sumber daya alam. Kebijakan yang memprioritaskan pengelolaan SDA kepada pengusaha skala besar (*landlord bias*), lemahnya perlindungan hak kepemilikan rakyat khususnya petani dan masyarakat adat. Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengungkapkan bahwa 0.2 persen penduduk menguasai 56 persen kekayaan nasional, 86 persen kekayaan tersebut berupa tanah dan sumber daya alam.

Terkait dengan berbagai ketimpangan di atas, Stiglitz, J. (2012, h.2-47), bagian kedua buku *The*

Price of The Inequality, dengan belajar dari Amerika, mengingatkan kepada banyak negara, bahwa terjadinya ketidaksetaraan dan ketimpangan dalam pembangunan akan menyebabkan degradasi terhadap nilai demokrasi, sebagai tulang punggung negara sebagaimana negara Amerika. Indikator yang dapat dicermati ialah proses politik yang menjadi terganggu yang bukan lagi *one man one vote* yang berlaku, melainkan *one dollar one vote*. Dampaknya adalah, semua hal yang dilakukan pemerintah dapat dikendalikan oleh orang-orang kaya untuk kepentingan sendiri dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pun mulai menurun dan terjadi kesulitan dalam penerapan kebijakan pemerintah. Di sisi lain, kepercayaan merupakan salah satu faktor yang menguatkan *social capital*. Dengan *social capital* yang kuat dan lebih tinggi, maka akan terjadi produktifitas yang baik dimana masyarakat menjadi lebih mudah diajak bekerja sama karena adanya semacam perekat.

Atas dasar di atas, dapat dikemukakan bahwa Nawa Cita memberikan suatu perubahan paradigma yang sungguh-sungguh tidak menempatkan pembangunan hanya pertumbuhan yang tersentral. “Mulai dari pinggir”, adalah niat awal Jokowi untuk memulai pembangunan dengan memikirkan masalah pemerataan dan kesetaraan pembangunan antar daerah. Seperti diungkapkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Irman Gusman (2014) sebagai berikut:

“Saya berharap pemerintahan saat ini (Jokowi-JK) harus mampu mengubah paradigma pembangunannya yang selama ini dianggap hanya terlalu mengejar pertumbuhan dan meninggalkan pembentukan kekuatan ekonomi masyarakat asli daerah. Perubahan tersebut diperlukan dalam upaya mendukung agar para profesional di daerah dapat diserap, daerah tidak hanya sekedar penonton dan tingkat distribusi 'kue pembangunan' di daerah itu tidak direbut segelintir orang dan meningkatkan upaya komprehensif untuk membangun daerah, sehingga koordinasi lintas sektor yang mampu sepenuhnya menunjang pembangunan daerah secara lebih sistematis.”

Pembangunan sejatinya merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik dalam kehidupan sosial dan lingkungan alam. Pembangunan sejatinya juga harus dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia yaitu keamanan, kebebasan, kesejahteraan dan kehidupan budaya dengan mengadopsi nilai inklusif, setara dan adil untuk semua kelompok, terutama memastikan perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas dan kelompok minoritas terlibat dalam proses pembangunan (Sen, A. 1999, h.23).

Cita Keempat: Menolak negara Lemah dengan Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya

Seperti dikemukakan di atas, walau pembangunan Indonesia telah memberikan angka pertumbuhan yang tinggi, namun Indonesia masih masuk dalam negara terkorup. Padahal korupsi adalah kejahatan luar biasa yang menggeroti hajat hidup suatu negara. Indonesia juga masih merupakan negara yang penuh dengan suap dan kolusi. Survei *Global Corruption Barometer* pada 2013, menunjukkan 1 dari 3 warga (36%) mengaku harus membayar suap untuk memperoleh layanan di 8 instansi publik utama. Suap terbesar dialami saat berhubungan dengan layanan di kepolisian (75%), peradilan (66%), catatan sipil (37), pertanahan (32%), pendidikan (21%), medis dan kesehatan (12%), pajak (6%), serta listrik, air dan telepon (4%) (Faisol, dkk, 2014, h. 6-17). Sementara itu, biaya korupsi di Indonesia antara

2001-2009 telah mencapai Rp. 73 triliun (Transparansi International, 2013).

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam beragam kesempatan Jokowi (2014), menegaskan tekadnya membentuk pemerintahan yang bersih. Pemerintahan bersih terutama dilakukan dengan pencegahan, seperti dikemukakannya dalam satu kesempatan pidato: “dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, pencegahan dengan membangun sistem yang komprehensif sama pentingnya dengan penegakan hukum”

Selain masalah pemberantasan dan pencegahan korupsi, Pemerintah berkualitas harus memberi ruang terhadap keterbukaan informasi. Akses informasi publik yang memadai memungkinkan masyarakat berpartisipasi secara maksimal terhadap pengawasan pelayanan publik, perencanaan alokasi anggaran dan sebagainya (Stiglitz, 2012, h.53-55). Pembangunan harus mendorong masyarakat memiliki kebebasan atas jaminan keterbukaan (*transparency guarantees*). Kebebasan ini merupakan kebebasan individu saat berinteraksi sosial dengan yang lain dengan jaminan adanya kesediaan untuk saling terbuka. Di sini yang didorong adalah meningkatkan saling percaya di antara individu dalam kehidupan sosial. Dengan adanya kepercayaan, maka semua orang akan terhindar dari rasa saling curiga, yang telah memberi dampak buruk dalam mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Keterbukaan juga sangat diperlukan oleh dan dari pemerintah dalam mengelola aktivitas negara dan dengan itu maka negara akan terbebas dari penyakit kolusi, korupsi, dan nepotisme yang sangat merugikan kehidupan masyarakat, seperti dikemukakan oleh Sen (1999, h.40), sebagai berikut:

“Transparency guarantees can thus be an important category of instrumental freedom. These guarantees have a clear instrumental role in preventing corruption, financial irresponsibility and underhand dealings.”

Dalam bidang penekan hukum, *Indeks Rule of Law* (ILR, 2015), menunjukkan bahwa 60% dari masyarakat memandang hakim di Indonesia tidak bersih dari praktik suap. Di samping kualitas kehakiman yang sangat buruk, kualitas penegakan hukum di Indonesia semakin diperparah dengan kinerja para penegak hukum yang buruk. Di dalam *ILR* yang dibuat oleh *World Justice Project* tahun 2014, kinerja penegak hukum di dalam menjalankan penyelidikan/penyidikan yang efektif sangatlah buruk (0.31), sementara penegakan *due process of law* di dalam proses hukum pidana juga sama buruknya (0.35). Bobroknya institusi penegakan hukum seperti yang disebutkan di atas telah membuat Indonesia terpuruk ke dalam peringkat 80 dari 99 negara yang disurvei terkait dengan Indeks Penegakan Hukum (IPH) dan bahkan skor Indonesia lebih rendah dibandingkan Etopia secara keseluruhan.

Oleh karena itu, kepentingan pemerintahan yang bersih, tidak korup dan tidak menerima suap serta penegak hukum yang berwibawa, bersih dan profesional adalah satu hal yang mendesak. Kerugian akibat korupsi, kolusi dan suap sudah sangat besar. Dana yang dikorupsi, uang masyarakat untuk suap seharusnya membuat negara cukup memiliki dana untuk menurunkan kematian ibu dan mengalihkan cadangan keuangan negara, serta menggunakannya untuk anggaran kesehatan. Masyarakat Transparansi Internasional (Transparency International, 2012) menunjukkan bahwa

praktik yang bernegara dalam suatu mekanisme anti korupsi di beberapa negara seperti Bangladesh, Colombia, Georgia, Ghana, Liberia and Mexico telah membantu pencapaian MDGs.

Dalam konsep pembangunan, kebebasan menjadi rujukan paradigma pembangunan manusia. Sen (1999, 56-59), menegaskan bahwa dalam konteks pembangunan, maka keadilan harus menjadi perhatian utama. Keadilan harus diletakkan pada bagaimana penyediaan peluang bagi masyarakat untuk hidup sesuai dengan pilihan kehidupan mereka sendiri dan nilai etis yang mereka anut. Sen menyampaikan hubungan antara keadilan dan pembangunan dalam dua ide utama, yaitu kebebasan dan penalaran makna atas kebebasan yang kesemuanya menuju kepada tujuan kehidupan manusia tentang kehidupan yang baik dan masyarakat yang baik. Untuk menjamin hal tersebut, negara dan pemerintah harus memiliki sistem hukum yang baik, yang tidak semata menempatkan keadilan yang memiliki hukum positif, tetapi sistem hukum harus didasari pendekatan komparatif yang berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Sistem hukum juga harus mendorong kemungkinan masyarakat mengevaluasi negara dan menilai apakah putusan yang ditetapkan yang satu lebih baik atau lebih buruk daripada yang lain, dan hal ini sudah cukup untuk mengatasi ketidakadilan (Sen, A. 1999, dalam Syamsi, SS. 2012, h. 03-107).

Cita Kelima: Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia

Pembangunan sejatinya merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik dalam kehidupan sosial maupun lingkungan alam. Pembangunan sejatinya juga harus dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia yaitu keamanan, kebebasan, kesejahteraan dan kehidupan budaya dengan mengadopsi nilai inklusif, setara, dan adil untuk semua kelompok, terutama memastikan perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas dan kelompok minoritas terlibat dalam proses pembangunan. Pembangunan adalah upaya meningkatkan kualitas hidup manusia.

Indonesia adalah negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil; negara yang walaupun pertumbuhan tinggi, pembangunan di Indonesia belum memberikan kualitas kehidupan yang baik bagi seluruh masyarakatnya. Seperti dikemukakan di atas, Angka Kematian Ibu (AKI), di Indonesia masih termasuk dalam negara dengan AKI yang tinggi. Angka Kematian Ibu di Indonesia melaju 359/100.000 (Data SDKI Tahun 2012 diterbitkan 2013). Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), AKI per 100.000 kelahiran hidup menurun secara bertahap, dari 390 (1991): 334 (1997), 307 (2003), dan 228 (2007). Akan tetapi, tahun 2012 melonjak menjadi 359, dan hal tersebut tidak jauh berbeda dengan keadaan 22 tahun yang lalu. Tingginya angka kematian ibu, juga menjadi salah satu bukti dimana kelompok perempuan menjadi kelompok yang selama ini telah terabaikan dalam pembangunan (Saptono, I. 2013, h.3-5). Masalah kesehatan lainnya seperti *malnutrisi* dan kurang gizi, selama 10 tahun angkanya cenderung stagnan bahkan meningkat. Proporsi balita malnutrisi meningkat dari 4,9% (Riskesdas 2010) menjadi sebesar 5,7% (Riskesdas 2013), sedangkan proporsi balita kurang gizi meningkat dari 13% menjadi 13,9% pada periode yang

sama. Dalam hal penyakit menular, sampai dengan saat ini menjadi masalah kesehatan yang belum benar-benar ditangani, Indonesia masih menjadi negara nomor empat sebagai penderita Tuberkulosis (TB) dan juga diabetes di dunia. Indonesia mengalami peningkatan jumlah kematian akibat HIV/AIDS sebanyak 427 persen selama tahun 2005-2013 (UN-AIDS, 2013).

Selain masalah kesehatan, kemiskinan dan ketimpangan yang telah dikemukakan di atas, masalah lain mengenai kualitas kehidupan yang baik seperti: kerusakan sumber daya alam, masih banyak kelompok yang terpinggirkan seperti, petani nelayan, perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat, menjadi bukti bahwa “negara tidak hadir” dalam permasalahan yang dihadapi warganya. Warga dibiarkan berjuang sendirian menghadapi masalah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik bagi kehidupan mereka. Perlindungan negara terhadap aksestabilitas warga masyarakat untuk pelayanan dasar, pekerjaan, pendidikan, lingkungan hidup, dan pangan seperti yang diamanatkan konstitusi belum memadai. Oleh karena itu, pemenuhan hak-hak warga perlu menjadi prioritas pembangunan ke depan, dengan kata lain paradigma pembangunan yang akan dijalankan bukan hanya pembangunan inklusif, tetapi juga harus berlandaskan perlindungan hak warga dan pemenuhan hak warga untuk meningkatkan kualitas kehidupan.

Tesis sederhana Sen yang berjudul *Development as Freedom*, mengemukakan bahwa pembangunan adalah pengembangan kapabilitas (kemampuan). Dengan pendekatan ini, setiap individu bertanggungjawab untuk memimpin sendiri kehidupan mereka untuk menjadi kehidupan yang lebih baik, dan berkualitas sesuai dengan nilai yang diinginkannya, tidak hanya pada tatanan gagasan, tetapi harus diaktualisasikan dalam kehidupan mereka dalam tata kehidupan sosial mereka, dimana hal ini tidak terlepas dari tanggung jawab negara dan masyarakat. Dengan demikian, tugas negara adalah memberi ruang-ruang pilihan bagi seluruh masyarakat dalam memenuhi kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup. Selain itu, negara berkewajiban memberi ruang agar masyarakat dapat berperan dalam memengaruhi perubahan sosial, dan peran mereka dalam memengaruhi produksi ekonomi. Dengan demikian, tugas pemerintah adalah fokus pada upaya pengembangan ruang pilihan kapabilitas, agar individu memiliki kebebasan, kesetaraan dan keadilan dalam meraih sesuatu yang bermanfaat dalam meningkatkan kualitas kehidupannya (Syamsi, 2012, h.78).

Cita Keenam dan Ketujuh: Membangun Kedaulatan Ekonomi dan Produktifitas Rakyat dan Kemandirian Ekonomi

Suatu bangsa akan *survive* dan maju dalam percaturan global apabila bangsa itu dapat membangun apa yang disebut sebagai kemampuan produktif (Georg Friedrich List, 1789-1846).

Dalam pidato visi misinya Jokowi (2014) menegaskan bahwa pembangunannya adalah mendorong kemandirian, seperti berikut:

“Pembangunan Ekonomi adalah pemerataan dan ekonomi berdikari. Percuma ekonomi baik kalau tidak ada pemerataan. Pembangunan juga harus mendorong partisipasi rayat melalui pembangunan koperasi, UMKM, pasar tradisional, ekonomi maritim dan industrinya, Pembangunan harus mendorong kebaikan yang membuat rakyat semakin sejahtera, agar ekonomi Indonesia akan lebih baik dan berdikari.”

Cita Keenam: Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional

Indonesia kini menjelma menjadi negara berpendapatan menengah dengan pendapatan per kapita sebesar USD 3.580. Pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dengan rata-rata 5-6% per tahun selama 10 tahun terakhir telah melahirkan tambahan kelas menengah, terutama di kota-kota besar. Namun demikian, di samping berbagai pencapaian tersebut, Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan yang tidak ringan. Tantangan tersebut antara lain dalam bidang ekonomi adalah rentannya kemandirian ekonomi, baik kemandirian modal finansial, teknologi, dan kemandirian pasar akibat masih tingginya impor barang-barang yang sebenarnya dapat dikerjakan sendiri atau diproduksi sendiri di dalam negeri.

Dalam konteks ini, Bapak Ekonomi Pertumbuhan Adam Smith (1776), mengingatkan bahwa sesungguhnya apabila perekonomian mampu melakukan pembagian kerja (*division of labor*), hal tersebut akan mendorong pertumbuhan dan meningkatkan produktivitas yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan. Namun, diingatkan bahwa pertumbuhan harus mendorong perluasan pasar, karena dengan meluasnya pasar akan terbuka inovasi-inovasi baru yang pada gilirannya akan mendorong perluasan pembagian kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi kembali.

Teori pertumbuhan juga menemukan faktor-faktor lain di luar modal dan tenaga kerja, yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Faktor tersebut adalah investasi sumber daya manusia yang mempunyai pengaruh yang besar terhadap peningkatan produktivitas. Menurut Becker (1964), peningkatan produktivitas tenaga kerja dapat didorong melalui pendidikan dan pelatihan serta peningkatan derajat kesehatan. Teori *human capital* ini selanjutnya diperkuat dengan berbagai studi empiris, antara lain untuk Amerika Serikat oleh Kendrick (1976), yang mengemukakan bahwa meningkatnya stok pengetahuan dan ide baru dalam perekonomian dapat mendorong tumbuhnya daya cipta dan inisiatif yang diwujudkan dalam kegiatan inovatif dan produktifitas masyarakat (Kartasmita, 1997, h.4-6).

Dalam kerangka pembangunan untuk kesejahteraan, dan memperhatikan bahwa subjek yang perlu dibangun adalah "bangsa" atau "rakyat" dalam suatu negara (*nation building*), maka proses pembangunan harus menghasilkan beberapa hal, yaitu: (1) Terciptanya "solidaritas baru" yang mendorong pembangunan yang berakar dari bawah (*grassroots oriented*), (2) Memelihara keberagaman budaya dan lingkungan, dan (3) Menjunjung tinggi martabat serta kebebasan bagi manusia dan masyarakat (Korten, 1984).

Dengan demikian, pembangunan harus didefinisikan sebagai upaya meningkatkan kemampuan rakyat dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat sehingga dapat meningkatkan produktivitas rakyat. Dengan demikian, rakyat dan lingkungannya mampu secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah ekonomis.

Oleh karena itu, dapatlah diartikan bahwa pembangunan hendaknya memberdayakan

masyarakat, sehingga tidak saja menumbuhkan dan mengembangkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga nilai tambah sosial dan nilai tambah budaya. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat "*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*" (Chambers dalam Kartasasmita, 1997, h.7). Konsep memberdayakan masyarakat adalah konsep pembangunan yang lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses kemiskinan lebih lanjut (*safety net*), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan. Konsep ini berkembang dari upaya banyak ahli dan praktisi untuk mencari apa yang antara lain oleh Friedman (1992) disebut sebagai *alternative development*, yang menghendaki "*inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality and intergenerational equity*" (Kartasasmita, 1997, h.6-9).

Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Sungguh penting di sini adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan dan pengamalan demokrasi. Friedman (1992) dalam Kartasasmita (1997, h.8), yang menyatakan:

"The empowerment approach, which is fundamental to an alternative development, places the emphasis on autonomy in the decision-making of territorially organized communities, local self-reliance (but not autarchy), direct (participatory) democracy, and experiential social learning."

Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*), akan tetapi proses mendorong masyarakat untuk mandiri, meningkatkan produktifitasnya serta memiliki daya tahan terhadap pengaruh global yang semakin terbuka dan pada gilirannya memiliki daya saing yang kuat dalam percaturan persaingan global.

Cita Ketujuh: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik

Kartasasmita (2014, h.2-3) mengemukakan beberapa hal terkait perubahan paradigma pembangunan Indonesia menuju kemandirian. Keberhasilan pembangunan Indonesia yang sampai menjadi negara industri baru, termasuk dalam kelompok negara berpendapatan menengah, dengan tingkat kemiskinan di bawah 5 % ternyata telah menutup mata kita terhadap masalah besar yang dihadapi, yaitu masalah kesenjangan dan ketergantungan kepada sumber daya luar negeri yang membuat ekonomi Indonesia gampang runtuh karena guncangan krisis. Oleh karena itu, salah satu upaya dalam membangun ekonomi Indonesia adalah dengan menghindari terjadinya kekeliruan yang sama yaitu pertumbuhan yang tinggi saja tidak membuat ekonomi menjadi kokoh namun harus dengan fondasi kemandirian dan

keadilan.

Kemandirian adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi dirinya. Oleh karena itu, pembangunan sebagai usaha untuk mengisi kemerdekaan, haruslah pula merupakan upaya membangun kemandirian. Kemandirian merupakan konsep yang dinamis karena mengenali bahwa kehidupan dan kondisi saling ketergantungan senantiasa berubah, baik konstelasinya, perimbangannya, maupun nilai-nilai yang mendasari dan memengaruhinya. Untuk dapat mandiri, suatu bangsa harus maju. Suatu bangsa dikatakan makin maju apabila makin tinggi tingkat pendidikan penduduknya, makin tinggi tingkat kesehatannya dan makin tinggi tingkat pendapatan penduduk, serta makin merata pendistribusiannya.

Namun, meskipun kemajuan dan kemandirian mencerminkan perkembangan ekonomi suatu bangsa, ini tidak semata-mata konsep ekonomi. Kemajuan dan kemandirian juga tercermin dalam keseluruhan aspek kehidupan, dalam kelembagaan, pranata-pranata, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik dan sosial. Secara lebih mendasar lagi, kemandirian sesungguhnya mencerminkan sikap seseorang atau suatu bangsa mengenai dirinya, masyarakatnya, serta semangatnya dalam menghadapi tantangan-tantangan. Karena menyangkut sikap, maka kemandirian pada dasarnya adalah masalah budaya. Karena itu, ukuran kemajuan dan kemandirian suatu bangsa tidak dapat hanya berupa pendapatan per kapita, tetapi lebih mendasar lagi menyangkut manusianya. Manusia adalah sumber daya pembangunan yang paling utama di antara sumber-sumber daya lain yang akan dibangun kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan. (Kartasisamita, 2004, h.3-4). Amartya Sen (1999, h.233) mengemukakan bahwa:

“These facilities are important not only for the conduct of private lives, (such living healthy life and avoiding preventable morbidity and premature mortality), but also for more effective participation in economic and political activity.”

Dalam pembangunan sebagai kebebasan, secara konstitutif pemerintah berkewajiban tidak saja menjaga kehidupan individu masyarakat untuk hidup lebih baik, namun juga berperan penting dalam mendorong terciptanya lingkungan yang kondusif, sehingga mendorong kemandirian masyarakat berpartisipasi dalam ekonomi dan aktifitas politik. Sen juga menyebutkan bahwa pembangunan yang benar adalah bila individu mampu mencapai sebuah cara hidup dan tingkat martabat di mana kemampuan personal bisa diwujudkan. Dalam konteks ini, pembangunan seharusnya mendorong dan merangsang suatu masyarakat membangun dirinya secara otonom, berakar dari dinamika dan kekuatannya sendiri (Syamsi, 2012, h.77-89).

Cita Kedelapan dan Kesembilan: Pembangunan adalah Revolusi Mental dan Menjaga Keberagaman

Jokowi, menulis dalam opini harian Kompas (2014), bahwa untuk mewujudkan pembangunan yang berkemanusiaan, tidak cukup hanya reformasi, akan tetapi dibutuhkan revolusi mental masyarakat Indonesia, seperti diungkapkan dalam beberapa pokok tulisannya sebagai berikut:

“Dalam pembangunan bangsa, saat ini kita cenderung menerapkan prinsip-prinsip paham liberalisme

yang jelas tidak sesuai dan kontradiktif dengan nilai, budaya, dan karakter bangsa Indonesia. Reformasi yang dilaksanakan di Indonesia sejak tumbang rezim Orde Baru Soeharto tahun 1998 baru sebatas melakukan perombakan yang sifatnya institusional, belum menyentuh paradigma, *mindset*, atau budaya politik dalam rangka pembangunan bangsa (*nation building*). Sejumlah tradisi atau budaya yang tumbuh subur dan berkembang di alam represif Orde Baru masih berlangsung sampai sekarang, mulai dari korupsi, intoleransi terhadap perbedaan, dan sifat kerakusan, sampai sifat ingin menang sendiri, kecenderungan menggunakan kekerasan dalam memecahkan masalah, pelecehan hukum, dan sifat oportunistik. Kesemuanya ini masih berlangsung, dan beberapa di antaranya bahkan semakin merajalela, di alam Indonesia yang katanya lebih reformis. Jelas reformasi, yang hanya menyentuh faktor kelembagaan negara, tidak akan cukup untuk menghantarkan Indonesia ke arah cita-cita bangsa seperti diproklamasikan oleh para pendiri bangsa. Agar perubahan benar-benar bermakna dan berkesinambungan, kita perlu melakukan revolusi mental. *Nation building* tidak mungkin maju kalau sekadar mengandalkan perombakan institusional tanpa melakukan perombakan manusianya atau sifat mereka yang menjalankan sistem ini. Sudah saatnya Indonesia melakukan tindakan korektif, tidak dengan menghentikan proses reformasi yang sudah berjalan, tetapi dengan mencanangkan revolusi mental menciptakan paradigma, budaya politik, dan pendekatan *nation building* baru yang lebih manusiawi, sesuai dengan budaya Nusantara, bersahaja, dan berkesinambungan. Revolusi diperlukan sebab Indonesia memerlukan suatu terobosan budaya politik untuk memberantas setuntas-tuntasnya segala praktik-praktik yang buruk yang sudah terlalu lama dibiarkan tumbuh kembang sejak zaman Orde Baru sampai sekarang.”

Cita Kedelapan: Melakukan Revolusi Karakter Bangsa

Dalam Paradigma Pertumbuhan, manusia adalah bagian dari modal dan penyebab permasalahan pembangunan di Indonesia adalah sudah sangat jelas, yakni kualitas manusia. Indonesia yang tidak memiliki masalah tentang ketersediaan sumber daya alam dan kuantitas penduduk sebagai basis perekonomian. Namun, karena manusia diposisikan sebagai barang ekonomi belaka dan tidak pernah menjadi fokus serius pembangunan, berkembanglah aneka virus di jiwa yang menjadikan manusia Indonesia bukan saja tak mampu menjaga dan memanfaatkan beragam kekayaannya, melainkan juga jadi penyebab keterpurukan bangsanya sendiri.

Karakter bangsa adalah kualitas perilaku kolektif kebangsaan yang khas, baik yang tecermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara sebagai hasil olah pikir, olah hati, olah rasa dan karsa, serta olah raga seseorang atau sekelompok orang. Karakter bangsa Indonesia akan menentukan perilaku kolektif kebangsaan Indonesia yang khas dan tecermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, norma UUD 1945, keberagaman dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen terhadap NKRI. Pembangunan Karakter Bangsa adalah upaya kolektif-sistemik suatu negara kebangsaan untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan dasar dan ideologi, konstitusi, haluan negara, serta potensi kolektifnya dalam konteks kehidupan nasional, regional, dan global yang berkeadaban untuk membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, patriotik, dinamis, berbudaya, dan berorientasi ipteks berdasarkan Pancasila dan dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pembangunan karakter bangsa dilakukan secara koheren melalui proses sosialisasi, pendidikan dan pembelajaran, pemberdayaan, pembudayaan, dan kerja sama seluruh komponen bangsa dan negara (Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa, 2014; 7-9).

Sehubungan dengan hal tersebut, Pembangunan hendaknya menjadi sarana bagi terciptanya ruang untuk mendorong karakter bangsa dari yang memiliki sikap mentalitas kepribadian yang lemah, kebudayaan bangsa yang tidak memiliki jangkar karakter yang kuat. Dengan pembangunan bangsa, Indonesia harus memiliki kekuatan karakter. Kekuatan itu dilakukan dengan pembangunan pendidikan yang menjadi lokomotif gerakan revolusi mental, yang wahana utamanya melalui proses persemaian dan pembudayaan. Proses pendidikan sejak dini, baik secara formal, nonformal, maupun informal, menjadi tumpuan untuk melahirkan manusia baru Indonesia dengan mental-karakter yang sehat dan kuat. Mengubah pola pikir dan mentalitas yang kuat bukan hal yang mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Karena ini adalah persoalan kebiasaan yang akan menjadi budaya, maka perlu perubahan sedikit demi sedikit untuk mengubah banyak pola pikir dan sifat serta pikiran masyarakat Indonesia. Banyaknya karakter dan sifat yang ada pada setiap suku dan kebudayaan masyarakat semestinya bisa menjadi cerminan bahwa dengan pluralitas, masyarakat Indonesia bisa maju dan mentalitas masyarakatnya bisa kuat.

Cita Kesembilan: Memperteguh Kebhinekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia

Hakikatnya, pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan tidak menyebabkan adanya perluasan ketimpangan pembangunan, serta melaksanakan pembangunan tanpa menurunkan daya dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Untuk itu, pelaksanaan pembangunan dilakukan melalui tiga dimensi. Pertama, dimensi pembangunan manusia dan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, perumahan dan mental. Kedua, dimensi pembangunan sektor unggulan dengan prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, dan kelautan serta pariwisata dan industri. Ketiga, dimensi pemerataan dan kewilayahan.

Dengan memerhatikan keniscayaan Indonesia yang memiliki keberagaman, pembangunan seharusnya dapat memperteguh kebhinekaan selain itu, menjaga nilai-nilai sosial yang sudah tumbuh di masyarakat. Amartya Sen mengemukakan bahwa Pembangunan Manusia bercirikan kepedulian terhadap kondisi “nature” lahiriah manusia yang berbeda satu dengan lainnya. Dan Pembangunan berkeadilan harus memerhatikan hal tersebut (Sen, 1999, h.67 -292).

Restorasi berasal dari kata *to restore*, atau diberi arti “*to bring back or to put back into the former or original state, atau to bring back from a state of changed condition*”. Jadi, restorasi bermakna mengembalikan pada keadaan aslinya atau mengembalikan dari perubahan yang terjadi. Restorasi bermula sebagai gerakan perubahan untuk memperbaiki kondisi (negara, bangsa, dan masyarakat) yang sedang rusak atau menyimpang dari tujuan yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Pentingnya Restorasi di Indonesia disampaikan B.J. Habibie pada 1 Juni 2004 dalam Sidang tahunan MPR, sebagai berikut:

“Reformasi 1998 sebagai tonggak ikhtiar demokratisasi Indonesia ternyata menyisakan kekecewaan banyak orang. Demokratisasi menjadi rutinitas suksesi kekuasaan tanpa memunculkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas, visioner, dan layak diteladani. Neo-liberalisme begitu mantap mencengkeram ekonomi Indonesia, sementara jatidiri sebagai orang Indonesia pun semakin tercerabut. Oleh karena itu kita perlu restorasi nilai kebangsaan sebagai pemandu arah menuju hari esok Indonesia yang lebih baik. Restorasi semakin menemukan relevansinya di tengah menguatnya paham radikalisme, fanatisme kelompok dan kekerasan yang mengatasnamakan agama yang kembali marak beberapa waktu terakhir ini. Saat infrastruktur demokrasi terus dikonsolidasikan, sikap intoleransi dan kecenderungan mempergunakan kekerasan dalam menyelesaikan perbedaan, apalagi mengatasnamakan agama, menjadi kontraproduktif bagi perjalanan bangsa yang multikultural ini. Fenomena fanatisme kelompok, penolakan terhadap kemajemukan dan tindakan teror kekerasan tersebut menunjukkan bahwa obsesi membangun budaya demokrasi yang beradab, etis dan eksotis serta menjunjung tinggi keberagaman dan menghargai perbedaan masih jauh dari kenyataan... Dalam perspektif itulah, restorasi diperlukan untuk memperkuat paham kebangsaan kita yang majemuk dan memberikan jawaban atas sebuah pertanyaan akan dibawa ke mana biduk peradaban bangsa ini berlayar di tengah lautan zaman yang penuh tantangan dan ketidakpastian.”

Salah satu organisasi masyarakat Nasional Demokrasi (Burhani, 2011) mengemukakan bahwa Restorasi harus berasas pada; Pertama, restorasi negara yang berupa upaya membangun keteladanan kepemimpinan, membangun karakter gotong royong sesuai dengan dasar negara, dan membangun kepercayaan rakyat terhadap institusi negara. Kedua, restorasi kehidupan rakyat yang berupa upaya membangun gerakan arus bawah atas prakarsa rakyat, yang membawa nilai-nilai kebajikan, spritualitas kebangsaan, solidaritas sosial, kearifan budaya lokal, dan etos kerja yang produktif. Ketiga, restorasi kebijakan internasional yang berupa upaya membangun keseimbangan baru dalam tata dunia yang lebih adil, damai dan menjaga kelestarian alam semesta.

Operasionalisasi Nawa Cita: Paradigma Pembangunan Manusia Indonesia, yang Berkelanjutan dan Berkeadilan Sosial, Suatu Catatan Kritis

Nawa Cita adalah landasan pembangunan pemerintahan Jokowi-JK sampai tahun 2019. Dari pembahasan dan analisis terhadap sembilan Cita dapat dikemukakan bahwa Nawa Cita pada prinsipnya Pembangunan Manusia Yang Berkelanjutan. Kepentingan membangun manusia ditegaskan oleh Jokowi (2014) dalam pidato pengantar debat bidang ekonomi sebagai berikut:

“Inti Pembangunan adalah perbaikan sumber daya manusia. Pembangunan ekonomi suatu negara adalah membangun sumber daya manusia yang lebih baik. Karena dengan pembangunan manusia itu kita akan menjadi manusia produktif. Karena kalau produktivitas kita meningkat, kita akan punya daya saing.”

Dengan prinsip menempatkan manusia dalam pembangunan, Nawa Cita menegaskan dan mengembangkan pemikiran yang dikemukakan oleh Amartya Sen, seorang filsuf dan peraih Nobel Ekonomi tahun 1988, serta penggagas pertama pemikiran paradigma pembangunan manusia, dan pemikiran tersebut di operasionalisasikan oleh sahabatnya Mahbub Ul Haq, dan difasilitasi oleh UNDP dalam indeks Pembangunan Manusia, dan pengukuran Kapabilitas Masyarakat atas pencapaian Fungsi Manusiaanya. Pembangunan sejatinya adalah membuat masyarakat menjadi berdaya. Pembangunan merupakan serangkaian upaya sadar untuk membebaskan masyarakat dari segala bentuk ketertindasan (*Development as Freedom*). Selain IPM, untuk mengukur keberhasilan paradigma pembangunan ini harus didasarkan dua dimensi utama yaitu: pertama, ketercapaian

kebebasan *substantive*, yaitu memperoleh kehidupan yang lebih berkualitas, kehidupan yang lebih baik sehingga dengan kebebasan itu manusia menjadi lebih punya nilai dan lebih tidak terkekang dalam menetapkan pilihan-pilihan sendiri, berinteraksi sosial secara lebih lengkap dan dapat memengaruhi dunia dimana dia hidup di dalamnya dengan pilihan politiknya (Sen, 1999, h.14-15). Oleh karena itu, keberhasilan kebebasan substantif akan berhubungan langsung dengan upaya penanggulangan kemiskinan ekonomi, kebebasan setiap orang untuk memuaskan rasa lapar atau memperoleh gaji yang cukup, atau untuk mencapai gizi yang cukup, atau untuk kebebasan untuk mendapatkan obat yang berkualitas, atau kesempatan untuk berpakaian secara memadai atau terlindung, atau untuk menikmati air bersih atau fasilitas sanitasi (Syamsi, 2012, h.60-68). Kedua adalah ketercapaian dan ketersediaan akses bagi masyarakat untuk melaksanakan tugas konstitutif/intititif, yaitu antara lain; tidak adanya ketidakbebasan dalam mengakses fasilitas publik dan perawatan sosial, seperti tidak memperoleh informasi tentang program epidemiologi, tidak adanya pengaturan untuk perawatan kesehatan secara berkelanjutan.

Hal lain adalah terbebas dari jauhnya jangkauan fasilitas pendidikan yang layak. Dalam kasus lain, tidak ada lagi pelanggaran terhadap kebebasan karena adanya pembatasan kebebasan berpolitik dan hak-hak sipil lainnya. Peran dari kebebasan instrumental adalah memberi peluang dan hak yang dapat mendorong terjadinya perluasan kebebasan manusia secara menyeluruh yang dapat memajukan pembangunan itu sendiri, seperti kebebasan memperoleh informasi terhadap harga produk merupakan bentuk kebebasan fasilitas-fasilitas ekonomi, kebebasan politik (dalam bentuk kebebasan berbicara dan pemilihan umum) membantu untuk mempromosikan keamanan ekonomi. Kebebasan memilih peluang sosial (dalam bentuk fasilitas pendidikan dan kesehatan) dan kebebasan memfasilitasi partisipasi ekonomi. Dalam konteks ini, peran utama yang harus dilakukan pemerintah adalah mendorong terciptanya lingkungan yang kondusif, memberi ruang yang luas dan membangun infrastruktur yang mampu mendorong kemandirian masyarakat, membantu dan memfasilitasi masyarakat dengan menyediakan infrastruktur yang memadai, sehingga masyarakat dengan bebas dapat mempergunakan peluang-peluang sosial yang ada secara optimal secara bersama-sama sehingga semua orang memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Namun demikian, dalam operasionalisasinya, Nawa Cita sebagai Paradigma pembangunan Manusia Indonesia, akan menghadapi tantangan dan hambatan sangat besar. Tantangan utamanya adalah tantangan birokrasi.

Birokrasi adalah faktor kunci keberhasilan operasionalisasi Nawa Cita, seperti disampaikan Yudi Krisnadi – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera 2014-2019 (Juni, 2015) yang mengemukakan “*key factor Nawa Cita adalah birokrasi. Kalau birokrasi berbelit, tidak jalan, jauh dari harapan masyarakat, itu semua (Nawa Cita) hanya akan jadi dokumen yang sulit diwujudkan*”. Birokrasi, dengan hampir 50 tahun menjalankan paradigma pertumbuhan ekonomi, dengan operasionalisasinya tersusun dalam ribuan proyek dan anggaran, yang disusun berdasarkan kompromi untuk mengejar pertumbuhan, tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan keberlanjutan akan sulit

menerima pemikiran Nawa Cita – Jokowi.

Hambatan utama dari birokrasi, disampaikan oleh Profesor Gumilar Rusliwa Sumantri, ahli sosial dan politik Indonesia, (2015), sebagai berikut:

“Konsep Nawa Cita sebuah prinsip yang baik dan cocok untuk Indonesia dengan segala tantangannya. Sebagai pandangan dan program yang merespons tantangan yang dihadapi bangsa dan negara, baik domestik maupun internasional. Tapi masalahnya dipelaksanaan masalahnya, pelaksanaannya secara menyeluruh belum bisa diandalkan, karena dua hal yang menonjol bisa menghambat, yakni dukungan birokrasi untuk melaksanakan dan kemauan politik pihak di luar pemerintah untuk mendukungnya. Selain itu, kekuatan *civil society* yang perlu lebih banyak berefleksi dan lebih bertumpu pada agenda besar membangun peradaban yang berguna bagi bangsa dan masyarakat.”

Kurangnya informasi pola subsidi BBM, keterlambatan penanggulangan suatu bencana, berbelitnya masalah perizinan, keterlambatan penyusunan nomenklatur kementerian, yang pada gilirannya terlambatnya pencairan anggaran pembangunan di satu sisi dan masih adanya biaya suap, dan biaya kolusi terkait pengadaan proyek adalah beberapa contoh bagaimana birokrasi belum siap menerima perubahan paradigma Nawa Cita. Dampak sangat merugikan Jokowi, karena dampak ke masyarakat adalah pemerintah yang tidak hadir, lalai, dan penuh korupsi.

Hambatan birokrasi juga membawa budaya kerjanya, seperti: 1) Kultur birokrasi dengan paradigma pertumbuhan yang berorientasi pada mengejar terselenggaranya proyek, dengan tata kelola yang masih belum transparan, masih terdapat suap dan korupsi seperti yang diperlihatkan dalam data skor indeks korupsi, yang masih rendah (32 dari 100) dan peringkat 114 dari 177 negara terkorup dan data *Global Corruption Barometer*, yang masih menunjukkan 1 dari 3 warga (36%), mengaku harus membayar suap untuk menyelesaikan permasalahan mereka. 2) Prosedur perizinan yang luar biasa panjang, lama, sulit dan birokrasi. Untuk hal ini, Jokowi berulang kali bicara seperti yang dikemukakan dalam kesempatan membuka forum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) International Trade and Investment Summit (AITIS) di JI-Expo, Kemayoran, Jakarta, Rabu, 13/5/2015 mengemukakan; “saya lihat banyak sekali potensi di daerah, kekuatan di daerah yang tidak terangkat dengan baik karena para pemimpin daerah terjebak dalam birokratisasi dan rutinitas kedaerahan”. Hambatan budaya kerja birokrasi ini, terlihat dari proyek RAPBN 2015-2016, dengan fokus pertumbuhan masih pertumbuhan, terlambatnya pelaksanaan tender proyek-proyek pemerintah dan terlambatnya penyusunan nomenklatur departemen yang berujung pada terlambatnya pelayanan kepada masyarakat. Demikian juga dalam membangun “dari pinggir” masih belum terlihat dalam RPJM 2014-2015 dan RAPBN 2015/2016. Anggaran pembangunan masih menunjukkan bahwa pembangunan bukan “dari pinggir” tapi “menuju pinggir”. Dengan anggaran seperti itu Jokowi akan sulit melaksanakan janji-janji yang disampaikan pada saat kampanye lalu, dan gilirannya Nawa Cita hanya jadi cita-cita.

Hambatan yang kedua adalah kemauan partai politik, baik pendukung pemerintah atau yang di luar pemerintahan. Tantangan di atas, sudah dilihat pada saat terjadinya kriminalisasi KPK. Dalam kasus itu terlihat Jokowi, tidak hadir atau terlambat hadir. KPK sudah terlalu jauh dikriminalisasi, dan

Jokowi hanya punya pilihan terbatas. Jokowi dituduh terlalu takut terhadap partai pendukung yang mendukung calon Kapolri, Jokowi dianggap masih sebagai Petugas Partai bukan Kepala negara.

Tantangan lain adalah tuntutan global, yang masih menjadikan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan dan menjadi patokan masuk-tidaknya Investasi dari luar, termasuk dari Institusi Lembaga Keuangan Internasional. Kuatnya pengaruh investor international membuat kekhawatiran Nasib Nawa Cita akan tenggelam dalam percaturan pemikiran paradigma pertumbuhan dan neo-liberal dan akhirnya akan hanya menjadi cita-cita.

Kesimpulan

Nawa Cita adalah Paradigma Pembangunan Manusia yang komprehensif lengkap dan menjadikan pembangunan di Indonesia tidak semata untuk kepentingan pertumbuhan, dan tidak hanya membuat suatu kemewahan yang tidak terbayangkan sebelumnya, tetapi mendorong terjadinya perubahan yang luar biasa di luar lingkup ekonomi, mendorong negara hadir dan membentuk banyak pemerintahan yang demokratis, bersih dan partisipatif. Dengan Nawa Cita, Jokowi menempatkan kesejahteraan manusia sebagai tulang punggungnya, sehingga dapat membawa kemasukakalan dalam bidang ekonomi yang dapat menghapus kemiskinan, mengurangi kelaparan, memperluas kesempatan aktifitas ekonomi, mengurangi deprivasi sosial, mengurangi pengabaian pelayanan publik, mengurangi ketimpangan dan kesenjangan, serta memperkuat restorasi sosial dan revolusi mental, serta penghapusan tirani yang represif.

Operasionalisasi Nawa Cita akan menghadapi tantangan berat dan tantangan utama yaitu birokrasi sebagai pelaksana utama Nawa Cita. Nawa Cita juga sangat tergantung dari dukungan parlemen yang dikuasai lawan politik Jokowi serta konsistensi partai pendukung untuk membela kepentingan rakyat. Tantangan Global juga akan menjadikan Nawa Cita harus dinegosiasikan agar investor dari badan-badan dunia yang berorientasi pada pertumbuhan dan neo-liberal serta masih dominan menguasai pemikiran pembangunan ekonomi global, tetap mau datang berinvestasi di Indonesia, sehingga pemerintah memiliki dana yang cukup untuk menyediakan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas publik, yang memungkinkan masyarakat luas memiliki pilihan-pilihan jalan untuk memperbaiki kualitas hidupnya yang lebih baik.

Saran

Untuk kelancaran operasionalisasi Nawa Cita, Jokowi hendaknya segera menguasai dan menata birokrasi. Jokowi meningkatkan komunikasi dengan parlemen yang dikuasai lawan politik, dan meningkatkan penempatan kepentingan rakyat di atas segalanya. Jokowi juga meningkatkan komunikasi politik luar negerinya. Jokowi segera merealisasikan ide juru bicara negara, untuk setiap duta besar negara sahabat, sehingga pemikiran Nawa Cita dapat dipahami dan menjadi rujukan pembangunan ekonomi lainnya.

Daftar Pustaka

- Adelman, I. 1999. "Fallacies in development theory and their implications for policy." Dalam *Working Paper no. 887*. Department Of Agricultural And Resource Economics And Policy Division Of Agricultural And Natural Resources, University Of California At Berkeley.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2014. *Rencana pembangunan jangka menengah nasional 2015-2019*. Jakarta.
- Bauman, A. S. 2009. *Ricoeur and the hermeneutics of suspicion*. New York: Continuum International Publishing Group.
- Basu, K. 2002. *Reading in political economy* (Ed). New York: Willey-Blackwell, Cornell University.
- Burhani, R. 2011. "Nasional Demokrat rampungan konsep restorasi Indonesia." Dalam *Antara News*, tanggal 30 Januari 2011. Diperoleh dari <http://www.antarane.ws.com/berita/244063/nasional-demokrat-rampungkan-konsep-restorasi-indonesia>
- Domar, E. D. 1946. Capital expansion, rate of growth, and employment. *Econometrica Journal of the Econometric Society* 14 (2), 137-147.
- Faisal, M. 2014. "Peneliti core, seperti apakah ideologi kerakyatan jokowi?" Dalam *Republika*, tanggal 23 September 2014.
- Faisol, A., dkk. 2014. *Indonesia adalah kita: usulan masyarakat sipil Indonesia untuk RPJMN 2015-2019*. International NGO Forum on Indonesian Development.
- Freeden, M. 2001. *Reassessing political ideologies: the durability of dissent*. London: Routledge.
- Friedman, J. 1992. *Empowerment: the politics of alternative development*. Cambridge: Blackwell.
- Goulet, D. 1977. *The cruel choice: a new concept in the theory of development*. New York: Atheneum.
- Gumilar, 2015. "Masyarakat Harus Beri Kesempatan Kepada JOKOWI-JK" Dalam *Berita Satu*, tanggal 19 Maret 2015. Diperoleh dari <http://www.beritasatu.com/nasional/258427-masyarakat-harus-beri-kesempatan-kepada-jokowijk.html>.
- Gusman, I. (2014). "Pemerintah Jokowi Harus Buah Paradigma Pembangunan" Dalam *Berita Buana*, tanggal 25 November 2014. Diperoleh dari <http://beritabuana.co/view/kanal/?open=23&alias=dpd&id=7057>
- Habibie, B.J. 2014. "Restorasi – reaktulisasi Pancasila." Dalam *Pidato di Sidang MPR* untuk Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, 1 Juni 2014, Humas MPR Indonesia.
- Harrod, R. F. 1948. An essay in the dynamic theory. *Economic Journal*. London: Macmillan.
- Harjasoemantri, K. 2013. "Good Governance dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia." *Makalah Seminar Hukum Nasional*, Universitas Udayana, Bali.
- Henderson, W.O. 1983. *Friedrich list 1789-1846: economist and visionary*. New York: Frank Cass And Company Limited.
- Locke, J. 1993. *Two treatises of government* (new edition). London.

- Kartasasmita, G. 1997. "Pembangunan menuju Bangsa Yang Maju dan Mandiri." Dalam *Sarasehan DPD GOLKAR Tk. I Jawa Timur Surabaya*, 14 Maret 1997 (hal.6-9). Institut Teknologi Bandung (ITB).
- Kartasasmita, G. 1995. "Pemberdayaan masyarakat, pembangunan berbasis rakyat, angunan menuju bangsa yang maju dan mandiri." Dalam *Pidato Pengukiran Guru Besar Honoris Causa Bidang Ilmu Sosial*, (hal. 2-5). Univeritas Gajah Mada.
- Kartasasmita, G. 2004. "Kemandirian dan keadilan sebagai paradigma pembangunan." Dalam *Pengantar Diskusi Pada Seminar Arsitektur Perekonomian Indonesia Berbasis Industri dan Daya Saing Global* (hal. 2-3). Diperoleh dari www.ginanjara.com.
- Keynes, J. M. 1936. *The general theory of employment, interest and money*. London: Macmillan.
- Korten, D. C. 1984. *People centered development*. West Harford: Kumarian Press.
- Krisnadi, Y., (2015), "Kunci Nawa Cita Ada Di Birokrasi" Dalam *Berita Intrik*, tanggal 3 Juni. Diperoleh dari <http://beritaintrik.com/read/kunci-nawa-cita-ada-di-birokrasi.html>.
- Kuhn, T. S. 2012. *The structure of scientific revolutions: 50th anniversary*. Ian Hacking (intro.) (4th ed.). Chicago: University of Chicago Press.
- KPU. 2014. *Visi misi Jokowi – JK, 2014*. Diperoleh tanggal 29 Juni 2015 dari, http://kpu.go.id/koleksigambar/VISI_MISI_Jokowi-JK.pdf.
- McLellan, D. 1995. *Ideology* (2nd Ed). Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. *Kebijakan nasional pembangunan karakter bangsa tahun 2010-2025*. Jakarta.
- Pieterse, J. N. 2010. *Development theory: deconstructions/reconstructions*. New York: Sage.
- Stiglitz, J. 1999. "On liberty, the right to know, and public discourse: The role of transparency in public life." Dalam *Oxford Amnesty Lecture* tahun 1999. United Kingdom: Oxford University.
- Stiglitz, J. 2012. "Inequality price." Dalam *Oxford Amnesty Lecture* tahun 2012. United Kingdom: Oxford University.
- Ricoeur, P. 1991. "The function of fiction in shaping reality." Dalam M. J. Valdes (ed). *A Ricoeur reader: refelction and imagination*. Toronto: University of Toronto Press.
- Ricoeur, P. 1998. *Hermeneutics and the human science*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Robert, W., Kates, T., dan Leiserowitz, A. 2005. What is sustainable development? Goals, indicators, values, and practice. *Environment: Science and Policy for Sustainable Development* 47 (3), 8–21. Diperoleh tanggal 2 April 2011 dari Harvard Kenedy School website: http://www.hks.harvard.edu/sustsci/ists/docs/whatisSD_env_kates_0504.pdf
- Rostow, W.W. 1960. "The five stages of growth--a summary." Dalam *The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto* (hal.1). Cambridge: Cambridge University Press.
- Sen, A. 1999a. *Development as Freedom*. Oxford: Oxford University Press.
- Sen, A. 1999b. *Handbook of Development Economics vol. 1*. Nort Holand.

- Syamsi, S. S. 2012. *Teori ekonomi pembangunan dan etika pembangunan, Amartya Sen*. Unpublished disertation. Universitas Indonesia.
- Soemantri, G.R. 2015. “Birokrasi dan stabilitas politik hambat Jokowi-JK wujudkan nawa cita.” Dalam *Berita Satu*, tanggal 19 Maret 2015. Jakarta.
- Transparency International. 2013. *Global corruption barometer*. Diperoleh tanggal 9 Juli 2015 dari <http://www.transparency.org/gcb2013/results>.
- Transparancy Internasional. 2015. *2015 and beyond: the governance solution for development*. Diperoleh tanggal 9 Juli 2015 dari <http://www.scribd.com/doc/157622801/OGP-Letter-to-UN-Secretary-GeneralTransparencyInternational>.
- United Nations Development Programme (UNDP). 2001. *Human development report 2001*. New York: Oxford University Press.
- United Nations Programme on HIV/AIDS (UN AIDS). 2013. *Report on the global AIDS epidemic 2013*. WHO.
- Widodo, J. 2014a. “Revolusi mental.” Dalam *Opini harian Kompas*, tanggal 10 Mei 2014.
- Widodo, J. 2014b. “Pidato pengantar debat, visi-misi, bidang ekonomi.” Dalam *Arsip KPU* bulan Juni 2014. Diperoleh pada tahun 2015 dari www.kpu.or.id.
- World Commission on Environment and Development (WCED). 2014. *Report of the world commission on environment and development: our common future*. Diperoleh tanggal 26 Mei 2015 dari <http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm>.
- World of Justice. 2015. *Rule of law index*. Diperoleh tanggal 20 Mei 2015 dari <http://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index>

This page is intentionally left blank.